

PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN

Choirul Anam
UNIVERSITAS DARUL ULUM
Jl. Airlangga No. Sukodadi - Lamongan
Email : choirulanam@unisda.ac.id

ABSTRAK

Untuk mengetahui tentang ada tidaknya peningkatan pendidikan politik masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan, dalam penelitian akan dilakukan pengolahan data secara statistik terhadap beberapa program yang telah disusun oleh tiga lembaga yaitu Bakesbangpol, KPU dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan.

Untuk program yang telah disusun oleh Bakesbangpol terkait dengan peningkatan pendidikan politik adalah kegiatan tim verifikasi bantuan untuk sembilan partai politik peserta pemilu, kegiatan sosialisasi politik kaum perempuan, dan yang terakhir adalah kegiatan sosialisasi undang-undang pemilu. Beberapa program yang telah disusun oleh tiga lembaga yaitu Bakesbangpol, KPU dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan ini akan diolah dan diuji secara statistik apakah beberapa program ini berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendidikan politik atau tidak.

Keyword : pendidikan politik, partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik

ABSTRACT

To find out about whether or not there is an increase in community political education in the Lamongan District, in the research data will be processed statistically on several programs that have been prepared by three institutions namely Bakesbangpol, KPU and the Lamongan District Youth and Sports Service.

For the program prepared by Bakesbangpol related to improving political education is the activity of the team for the verification of assistance for nine political parties participating in the election, women's political socialization activities, and finally the dissemination of election law. Some programs that have been prepared by three institutions namely Bakesbangpol, KPU and the Lamongan District Youth and Sports Service will be processed and tested statistically whether some of these programs have a significant effect on improving political education or not.

Keyword: political education, community participation in political education

PENDAHULUAN

Istilah pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah *political socialization*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik. Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ramlan Surbakti (1999:117) mengemukakan bahwa pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki kesamaan dalam istilah. Dalam bahasa Inggris kedua istilah ini memang sering disamakan. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Melalui proses sosialisasi politik para anggota masyarakat dapat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, di dalam pendidikan politik terjadi proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, partai-partai politik dan berbagai macam media penerangan. Pendidikan politik juga memiliki dasar-dasar ideologis, sosial dan politik. Bertolak dari situlah tujuan-tujuannya dirumuskan. Jika yang dimaksud dengan "Pendidikan" adalah proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka "Pendidikan Politik" dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik.

Sebagaimana halnya bahwa pendidikan mempunyai fungsi-fungsi pemikiran moral, dan ekonomi, maka pendidikan politik juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan politik itulah yang akan menyiapkan anak bangsa untuk menggeluti persoalan sosial dalam medan kehidupan dalam bentuk atensi dan partisipasi, menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan memberi

kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan kewajibannya.

Amirmachmud (1986:229-230) mengemukakan, pendidikan politik pada hakikatnya merupakan esensi dari proses pembangunan politik yang seyogyanya berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan, seiring dengan perjalanan hidup dari sistem politik. Dalam rangka pembinaan budaya politik Pancasila, maka pendidikan politik yang diterapkan mencakup dua aspek utama, yaitu:

1. Sebagai kegiatan yang secara sistematis ditujukan untuk menumbuhkan penghayatan rakyat terhadap ideologi negara Pancasila serta menjelaskan secara jujur permasalahan dan tantangan yang secara nyata dihadapi oleh sistem politik dewasa ini dan di masa depan.
2. Sebagai praktek kehidupan politik yang secara langsung atau tidak langsung dapat berpengaruh terhadap pembentukan sikap, pola respons dan penghayatan rakyat terhadap kehidupan politiknya. Di sini mencakup perilaku politik dari tokoh-tokoh yang berperan sebagai pemimpin pemerintahan dan tokoh politik yang duduk di dalam lembaga-lembaga supra struktur dan infra struktur politik.

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Merujuk pada semua pengertian pendidikan politik yang disampaikan di atas, pada akhirnya telah membawa penulis sampai pada kesimpulan yang menyeluruh. Bahwa yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol, hal-hal dan norma-norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Selain itu Pendidikan politik dalam tulisan ini juga dipahami sebagai perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin, sehingga para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan kesadaran dan partisipasi berdemokrasi serta partisipasi politik dalam kehidupan bernegara.

Menurut Colin Mc Andrews dan Mochtar Mas' oed (1978:42-43) partisipasi politik terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni secara Konvensional dan Non Konvensional, seperti dituliskan di bawah ini.

1. Partisipasi politik secara Konvensional adalah Pemberian suara(voting), Diskusi politik, Kegiatan kampanye, Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, Komunikasi individu dengan pejabat politik dan administrasi.
2. Partipasi Politik secara non Konvensional adalah Pengajuan petisi Demonstrasi, Konfrontasi mogok, Tindakan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran), Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan, perang gerilya dan revolusi).

Menurut pendapat mereka bentuk partisipasi politik "Konvensional" adalah bentuk partisipasi yang "Normal" dalam demokrasi modern. Sedangkan bentuk partisipasi politik "Non Konvensional" termasuk beberapa yang mungkin legal seperti petisi maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut ini adalah hasil penelitian yang didapatkan terkait dengan peningkatan pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan hasil olah data secara statistik yang didasarkan dari ketiga program kegiatan yang telah disusun oleh Bakesbangpol diperoleh hasil berikut :

1. Berdasarkan hasil olah data secara statistik dengan menggunakan Mann-Whitney U test diperoleh nilai asymp. Sig < 0,05 maka dapat disimpulkan ada pengaruh kegiatan "politik kaum perempuan" terhadap peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Lamongan secara signifikan
2. Berdasarkan hasil olah data secara statistik dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai asymp. Sig < 0,05 maka dapat disimpulkan ada pengaruh kegiatan "sosialisasi undang-undang pemilu" terhadap peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Lamongan secara signifikan.
3. Berdasarkan hasil uji wald- wolfowitz test didapatkan nilai asymp. Sig adalah 0,000. Karena nilai asymp. Sig < 0,05 maka dapat ditarik sebuah kesimpulan kegiatan "tim verifikasi bantuan parpol" berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendidikan politik

masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan.

Sedangkan untuk program kegiatan yang telah disusun oleh KPU yang akan diuji secara statistik adalah sosialisasi pilihan gubernur pada komunitas penyandang disabilitas dan sosialisasi pilgub bagi pelajar diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan moses test terlihat nilai sig (1-tailed) = 0,000. Karena nilai sig.(1-tailed) lebih kecil dari pada nilai pada taraf signifikan yaitu sebesar 0,05 maka sosialisasi pilihan gubernur pada komunitas penyandang disabilitas Lamongan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendidikan politik masyarakat di wilayah kabupaten lamongan
2. Berdasarkan hasil tes statistik Mann-Whitey U, menunjukkan nilai asymp sig (2-tailed) adalah 0,000. Nilai 0,000 lebih kecil dari pada nilai taraf significant sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan sosialisasi terkait pilihan gubernur pada komunitas penyandang disabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendidikan politik masyarakat di wilayah kabupaten lamongan.
3. Berdasarkan data test statistics dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai asymp sig (2-tailed) adalah 0,000. Karena nilai asymp sig kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan sosialisasi pilgub bagi pelajar berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendidikan politik masyarakat di wilayah kabupaten lamongan.

Adapun program kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Seleksi dan pembinaan paskibraka, Pendidikan dan pelatihan kesadaran bela negara bagi pemuda, Upacara sumpah pemuda, Kampanye pencegahan bahaya narkoba di kalangan pemuda dan Pembinaan perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyebaran penyakit HIV. Hasil yang didapatkan dari olah data secara statistik adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Hasil olah data statistik, kegiatan Seleksi dan pembinaan paskibraka dengan menggunakan Mann-Whitney U Test terlihat bahwa nilai asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,000. Karena nilai asymp. Sig lebih kecil dari pada 0,05, maka dapat disimpulkan kegiatan Seleksi dan pembinaan paskibraka berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendidikan politik masyarakat di kabupaten lamongan.

2. Berdasarkan hasil tes statistika dengan menggunakan moses test, terlihat nilai dari sig. (1-tailed) adalah 0,000. Nilai 0,000 jelas lebih kecil dari taraf signifikan yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan, melalui uji moses tes diperoleh sebuah kesimpulan kegiatan Pendidikan dan pelatihan kesadaran bela negara bagi pemuda berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendidikan politik masyarakat di kabupaten lamongan.
3. Berdasarkan hasil olah data statistik dengan menggunakan Kolmogorov- Smirnov test, diperoleh nilai asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Karena nilai asymp.sig lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan kegiatan Pendidikan dan pelatihan kesadaran bela negara bagi pemuda berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendidikan politik masyarakat di kabupaten lamongan.
4. Berdasarkan hasil olah data statistik dengan menggunakan wald-wolfowidz test didapatkan nilai dari asymp. Sig sebesar 0,000. Karena nilai asymp.sig kurang dari 0,05, dapat disimpulkan kegiatan upacara sumpah pemuda berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendidikan politik masyarakat di kabupaten lamongan.
5. Berdasarkan hasil olah data statistik dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov didapatkan nilai asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,000. Nilai asymp ini kurang dari 0,05. Karena nilai asymp kurang dari 0,05 dapat disimpulkan kegiatan kampanye pencegahan bahaya narkoba di kalangan pemuda berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendidikan politik masyarakat di kabupaten lamongan.
6. Berdasarkan hasil olah statistik dengan menggunakan uji moses test, didapatkan nilai sig. (1-tailed) adalah 0,00. Karena nilai sig (1-tailed) kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan kegiatan Pembinaan perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyebaran penyakit HIV berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendidikan politik masyarakat di kabupaten lamongan.
7. Berdasarkan hasil uji tes mann whitney U, didapatkan nilai asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,000. Karena nilai asymp kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan kegiatan Pembinaan perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyebaran penyakit HIV berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendidikan politik masyarakat di kabupaten lamongan.

Selanjutnya adalah untuk mengetahui tentang gambaran pengertian dan pemahaman politik masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan terkait dengan peningkatan pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Lamongan, dilakukan olah statistik menggunakan regresi liner berganda.

1. model kampanye yang disukai
2. dasar pertimbangan dalam memilih calon bupati dan
3. sikap terhadap politik uang.

Variabel-variabel yang diolah adalah :

1. model kampanye yang disukai
2. dasar pertimbangan dalam memilih calon bupati dan
3. sikap terhadap politik uang.

Hasil yang didapatkan dari olah data secara statistik menggunakan regresi liner berganda adalah :

1. Deskripsi statistik tentang gambaran pengertian dan pemahaman politik masyarakat dilihat dari beberapa aspek dalam memilih. Pada bagian ini merupakan tabel yang menyajikan deskriptif data masing-masing variabel yang meliputi Mean (rata-rata), Std. Deviation (standar deviasi) dan N = jumlah data. Sebagai contoh adalah mean dari variabel model kampanye untuk pemilihan bupati = 77,46; mean dari variabel dasar pertimbangan dalam memilih bupati = 79,95; mean dari variabel money politik = 2,76.
2. Korelasi gambaran pengertian dan pemahaman politik masyarakat dilihat dari beberapa aspek dalam memilih. Pada bagian ini menjelaskan nilai korelasi pearson. Besarnya nilai korelasi pearson antara variabel model kampanye untuk pemilihan bupati terhadap peningkatan pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Lamongan adalah 96,70%. Sedangkan besarnya nilai korelasi pearson antara variabel dasar pertimbangan dalam memilih bupati terhadap peningkatan pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Lamongan adalah 82,50%. Adapun besarnya nilai korelasi pearson antara variabel money politik terhadap peningkatan pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Lamongan adalah -36,2%. Berdasarkan nilai korelasi pearson, dapat disimpulkan variabel model kampanye memiliki pengaruh paling dominan terhadap peningkatan pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Lamongan, selanjutnya disusul oleh variabel dasar pertimbangan dalam memilih bupati dan disusul oleh variabel money politik.V3. Tabel Anova terkait peningkatan pendidikan politik dalam pengertian dan pemahaman politik masyarakat dilihat

(signifikan) variabel model kampanye (X1) dan dasar pertimbangan memilih bupati (X2) dan money politik (X3) secara simultan (bersama-sama) terhadap nilai peningkatan pendidikan politik (Y). Dari output pada model yang ketiga terlihat bahwa $F_{hitung} = 1675,3636$ dengan tingkat signifikansi atau probabilitas $0,000 < 0,05$, maka regresi dapat dipakai untuk memprediksi nilai peningkatan pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Adapaun peran pemerintah dalam pendidikan politik, adalah dilimpahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 dan tupoksi dari Bakesbangpol, adalah pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri, pengkoordinasian kegiatan kesatuan bangsa dan politik dengan instansi dan atau lembaga terkait. Bakesbangpol telah menyerahkan dana bantuan keuangan untuk bantuan politik (banpol) kepada partai politik peserta pemilu 2015, dimana 60 persen dana bantuan politik harus digunakan untuk pendidikan politik. Sejumlah program kerja Tahun 2018 juga telah disusun dan sebagian sudah dilaksanakan oleh Bakesbangpol sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) juga berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan politik melalui berbagai kegiatan sosialisasi.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga melalui serangkaian kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat dan bertujuan meningkatkan pendidikan politik.

Terkait dengan cara menyalurkan aspirasi masyarakat, pada umumnya, masyarakat lamongan menyalurkan aspirasinya melalui pemilu untuk memilih calon anggota dewan yang dapat dipercaya. Jika calon anggota dewan yang dipilih masyarakat adalah menang sehingga berubah status menjadi anggota dewan, maka masyarakat mengharapkan anggota dewan yang terpilih, dapat memperjuangkan aspirasi mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa kesimpulan :

1. Semua program yang telah dicanangkan oleh ketiga lembaga yaitu bakesbangpol, KPU dan Dispora

Kabupaten lamongan setelah dilakukan olah data secara statistik, berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Lamongan.

2. Besarnya nilai korelasi pearson antara variabel model kampanye untuk pemilihan bupati terhadap peningkatan pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Lamongan adalah 96,70% dan nilai korelasi pearson variabel model kampanye merupakan variabel paling dominan, diikuti oleh variabel dasar pertimbangan dalam memilih bupati sebesar 82,50% dan variabel yang paling kecil adalah variabel money politik sebesar -36,20%.

Saran

1. Untuk setiap tahun nya, disarankan perlu penambahan dana anggaran sebanyak dua kali lipat dari tahun sebelumnya bagi ketiga lembaga yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Komisi Pemilihan Umum dan Dinas Pemuda dan Olah Raga. Hal ini bertujuan agar pada waktu yang akan datang, ketiga lembaga ini bisa menambah volume kegiatan sosialisasi terkait dengan peningkatan pendidikan politik, sehingga diharapkan masyarakat Lamongan yang belum mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan peningkatan pendidikan politik, dapat diikuti dalam kegiatan sosialisasi tentang peningkatan pendidikan politik pada waktu yang akan datang. .
2. Disarankan sosialisasi dengan komunitas metal Lamongan secara outdoor dan Sosialisasi dengan komunitas pelajar lamongan di warung kopi beringin yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebaiknya perlu dikembangkan. Karena sosialisasi sepertinya termasuk sosialisasi bersifat fleksibel, tetapi diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat serta berfungsi menyebarluaskan program-program yang dimiliki oleh sebuah lembaga sehingga program-program bisa diketahui oleh masyarakat dan dilaksanakan secara bersama antara lembaga dan masyarakat.
3. Disarankan semua kegiatan sosialisasi selalu melibatkan disabilitas serta anak putus sekolah. Hal ini bertujuan mengangkat derajat mereka serta memperhatikan hak-hak politik mereka sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan politik mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Soeharto. 2009. *Makalah : Regulasi Demokrasi Dalam Berpolitik*. Pekalongan.
- Amirmachmud. 1986. *Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia*. Gramedia, Jakarta.
- A.A.Sahid Gatara. 2009. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Afan Gaffar. 2002. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Barky, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budiarjo, Miriam. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Budiardjo Miriam, 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hardjosoemantri Koesnadi, S.H, 1972, *Pengantar Ilmu Politik*. Seruling Massa, Jakarta.
- Jumali, M. dkk. 2008. *Landasan Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University. Press.
- Mas'ood Mochtar & Colin Mac Andrews .1978, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Matthew, B. Miles dan Huberman, A. Michael, Terj. Rohendi Rohidi, Tjeptjep, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, UI Press. Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Mufti, Muslim dkk. 2013. *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi. Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*. Paramadina, Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2005. *Hukum tata Negara Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. 2015. *Peraturan Bupati No 21 Tahun 2015 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik di kabupaten Lamongan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 tentang definisi Pendidikan Politik dan ayat 9 tentang definisi pemilu*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1988. *Psikologi Komunikasi*. Remadja Karya, Bandung.
- Robert A Dahl. 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sudiarja, (2006), *Karya lengkap Driyarkara*. Jakarta: Obor
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Surbakti, Ramlan. (1999) *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Utami, Santi Wijaya Hesti. 2001. "Kesetaraan Gender; Langkah Menuju Demokratisasi Desa" dalam *IP4-LAPPERA. Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi*. Yogyakarta: IP4- LAPPERA dan Asia Foundation.
- Wright, Charles R. 1988. *Sosiologi Komunikasi Massa*. Remadja Karya. Bandung.
- Sumber dari internet :
<https://manggamudablog.wordpress.com/2016/03/28/partai-politik-sebagai-sarana-penyalur-aspirasi-masyarakat-untuk-negeri-secara-aktif-dan-proaktif/>
- rofiqnasihudin.blogspot.com/2010/10/undang-undang-politik-dalam-perspektif.html